

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhamad. (1990). *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barkatullah, Halim A. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Penerbit Nusa Dua.
- Budiono, Herlien. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzia, Liza. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Medan: Persada Medika.
- Fukuyama, Francis. (2004). *The End of History and The Last of Man*, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, Terjemahan oleh: Amrullah, Yogyakarta: Qalam.
- Hakrisnowo, Hakristuti. (2004). Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pogram Doktor Pasca-Sarjana Universitas Indonesia.
- Handono, Adi. (2011). *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi iklan barang/ jasa yang menyesatkan*, Jember.
- Kristiyanti, Siwi T.C. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manullang E., & Fernando, M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Imdonesia*. Depok: Raja Grafindo.
- Muhammad & Alimin. (2004). *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Munir, Fuady. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.N.H Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- R Soeroso. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Setiawan. (1990). *Pokok –Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Raharjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Bakti.
- Salim, H.S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Oka K.I. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, N.H.T. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cet. ke-1, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Sidabalok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugianto, Fajar. (2013). *Economic Analysis Of Law*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Syawali, H., & Imaniyati, Sri. N. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung; Mandar Maju.
- Syawali, Husni dan Imaniyati, Neni S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung; Mandar Maju.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Nabella, Putri. (2016). Tidak Jujur Pelaku Usaha Pada Struk Belanja Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, 06(04), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177>.

Nasution, A. (2017). Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(6), 568-581.

Sumadi, Fadlil A. “*Hukum dan Keadilan Sosial*” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 6 September 2020, hlm. 5

Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 6 Desember 2020, hlm. 5

<https://www.ayobandung.com/read/2020/01/30/78031/nyicil-mitsubishi-pajero-warga-parongpong-dapat-nomor-rangka-berbeda>, diunduh pada tanggal 1 juni 2020 pukul 19.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal Pasal
Pasal 6 ayat (1) dan (2) Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No.
235/DJPDN/VII/2001 tentang Penangan pengaduan konsumen yang
ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota;

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 27 , dan Pasal 33;

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia